



Proyek SAH

Tetap Menunggu KPK

Menjaga Warga Agar tak Terganggu



KUR

YOGYA, TRIBUN - Kabar terbaru dari kelanjutan nasib proyek Saluran Air Hujan di Jalan Supomo dan sekitarnya datang dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Proyek tersebut dipasang garis kuning sebagai tanda penghenti-

an proyek usai operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap oknum jaksa pengawas.

Setelah lebih dari satu bulan, kelanjutan proyek itu mulai ada titik terang. Pem-



• ke halaman 7

Nggak cukup waktunya. Sekarang, Oktober, persiapan administrasi sebulan. Sebentar lagi November, Desember. Kita pikirkan adalah nutup

HEROE POERWADI
Wawali Yogyakarta

Proyek SAH

● Sambungan Hal 1

kot Yogyakarta telah menerima surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Isinya adalah pemutusan kontrak dengan pihak kontraktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Namun demikian, Kepala Bidang Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kota Yogyakarta, Sukadarsman, mengatakan, bukan pihaknya yang berwenang memproses teknis pemutusan kontrak dengan pihak ketiga. Artis mengatakan bahwa tugas mereka adalah melenggang pekerjaan.

"Kami tidak ada kewenangan ke sana. Pejabat pembuat komitmen dalam hal ini PU (Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman/DPUPKP) yang akan berkomunikasi dengan pemenang lelang kemarin," jelas Sukadarsman. Senin (30/9). Ia menambahkan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi untuk melakukan lelang ulang terkait proyek SAH untuk melanjutkan pembangunan di Jalan Supomo dan sekitarnya tersebut.

"Paket Supomo Cs kami belum (menerima info) karena proses KPK. Belum ada info apapun, menunggu KPK," ujarnya.

Sementara itu, ketika mencoba mengkonfirmasi terkait surat dari LKPP dan kelanjutan nasib proyek SAH Supomo Cs, pihak DPUPKP belum bisa ditemui maupun dihubungi via telepon.

Terpisah, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyebut bahwa LKPP telah memberikan surat kepada Pemkot terkait kelanjutan nasib proyek SAH Supomo Cs.

"Inti suratnya bisa memutus kontrak," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya tidak mungkin memulai lelang baru untuk pekerjaan tersebut mengingat proses untuk lelang hingga pekerjaan dirampungkan tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu secepat.

"Ngak cukup waktunya. Sekarang Oktober, persiapan administrasi sebulan. Seterusnya lagi November, Desember.

Kita pikirkan adalah nutup," ucapnya.

Namun Heroe mengatakan, penutupan proyek tersebut juga tidak bisa dilakukan seketika melainkan melalui proses audit terlebih dahulu.

"Tapi untuk melakukan itu (penutupan), audit dulu pemutusan dengan kontraktor yang bermasalah. Bepa yang kita kerjakan, yang harus kita tarik. Kalau itu sudah selesai secara keuangan diaudit sudah selesai dan pertanggungjawaban diterima, baru bicara menutup," urainya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Yogyakarta menunggu landasan kebijakan dalam hal ini dari KPK maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan landasan untuk menghentikan maupun melanjutkan kembali proyek tersebut sangat penting dan sangat dinantikan pihaknya, terlebih warga sekitar yang terdampak.

"Kita cari landasan itu bisa dari KPK dan LKPP. Tapi karena masih dalam pemeriksaan, maka kami harap KPK dapat memberi landasan," ujarnya.

Heroe menambahkan bahwa ia mengerti, baik akademis dan juga warga sekitar ingin proyek tersebut segera diselesaikan karena dampak yang ditimbulkan signifikan.

"Jalanan hampir dikeruk dua per tiga menyisakan sepertiga. Apalagi mengeruknya dalam untuk menanam gorong-gorong yang besar. Kalau bulan depan musim hujan, maka akan menjadikan ini terbuka dan tanah masuk ke gorong-gorong, kancan kiri jalan terkikis," urai Heroe.

Kalaupun belum bisa melanjutkan pembangunan SAH di titik tersebut, Heroe mengaku siap untuk menghentikannya.

Ia pun akan segera melakukan penutupan agar kondisi di area terdampak saat ini kembali pulih dan berangsur normal.

"Misal menghentikan, sudah kita uruk untuk menjaga warga tidak terganggu. Se-

ma ini sudah kami sampaikan ke KPK. Dari sana bilang tunggu saja surat tertulis dari kami," tambahnya.

Warga mengeluh

Sebelumnya diwartakan, warga di sekitar Jalan Babaran, Celeban, Tahuman, Umbulharjo, Yogyakarta yang terdampak proyek SAH Supomo cs berharap segera ada tindak lanjut dari Pemkot Yogyakarta menyusul terbentunya proyek tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya keluhan yang dirasakan warga.

Seperti tersendatnya ruas Jalan Babaran akibat sisa lubang bekas galian yang belum ditutup. Padahal jalan tersebut menjadi akses andalan lalu lintas warga setempat untuk beraktifitas sehari-hari. Juga debu yang sangat mengganggu pemipasan.

Yang lebih parah, genangan air di sisa bekas galian dikeluhkan warga membuat kulit menjadi bentol karena banyaknya nyamuk.

"Dampak ini dirasakan hampir seluruh warga di sekitar lokasi bekas proyek (SAH) tersebut. Warga juga semakin khawatir nanti efek negatifnya akan menjadi lebih parah kalau musim hujan datang sebentar lagi. Genangan air misalnya," kata Ketua RT 37, Imam Soliyon ketika dihubungi Tribun Jogja lewat sambungan telepon pada Kamis (19/9) lalu.

Atas kekhawatiran tersebut, menurut Imam, warga berinisiatif meminta kejelasan ke pihak Pemkot Yogyakarta terkait bagaimana kelanjutan proyek SAH. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk surat tertulis sebagai hasil diskusi dan pertemuan warga dari RT 37 dan 38 beberapa waktu lalu. Surat tertulis, diketahui sudah diserahkan ke Pemkot pada Rabu (18/9) lalu.

"Intinya kita meminta penjelasan soal kelanjutan soal proyek tersebut dan meminta penanganan yang konkret dari Pemkot Yogyakarta. Mau ditutup di bekas lubang, disiram air atau apapun bentuknya kami serahkan kepada Wali Kota. Asalkan warga tak lagi merasakan dampaknya seperti banyak nyamuk, debu dan akses jalan yang tersendat itu," kata Imam. (kur/sus)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005